**PENGALIHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTAMBANGAN BATUAN (GALIAN C) DARI PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR KE PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2017-2018**

Oleh : Reza

Email : rezaoke0193@gmail.com

Pembimbing : Drs. Erman M, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R.Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

After the enactment of Law no. 23/2014 The Government of Kampar Regency handed over the authority to manage mining affairs (Batuan Galian C) to the Riau Provincial Government. The management of mining affairs in Kampar Regency is technically managed by the Branch Office of Energy and Mineral Resources of Riau Province, region I of Kampar Regency after the transfer of authority. The purpose of this study was to analyze and describe the processes and policies after the transfer of authority for mining affairs from the Regency / City Government to the Riau Provincial Government which was carried out in Kampar Regency.

This study aims to examine how and what are the inhibiting factors for the diversion of the administration of quarry (C) mining affairs in the Kampar Regency Government in 2017-2018. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The location of this research was conducted in Kampar Regency and Pekanbaru City. Data collection techniques used are through interviews and documentation. The data analysis technique used is an interactive analysis model.

The results of the study concluded that based on the observations and analysis of the researchers were 1). The process of transferring government authority to mining affairs is proceeding quite well. However, especially in Kampar Regency, the Kampar Regency Mining Service Office Building looks abandoned and is not being used. Meanwhile, the Kampar District Office I Branch had to rent a building to become an office. 2). After the transfer of government affairs in the mining sector to the Riau Provincial Government, the Riau Provincial Government carried out many efforts to be able to properly exercise its authority based on the applicable Law. One of them is forming a Service Branch which is divided into 7 Regions. However, in the field it can be seen that the implementation of guidance and supervision carried out by the Riau Province government, both the Riau Province ESDM Service and the Kampar District I Regional Office Branch, has not been optimal. 3). Factors inhibiting the diversion of the implementation of quarry mining affairs c, namely: a) Lack of government coordination. b). Inadequate competency of personnel / employees. c). The number of employees is insufficient. d). The transfer of mining affairs to the Provincial Government is not accompanied by a transfer of mining business taxes / levies.

Keywords: *Operational Transfer, Authority, Quarry Mining C*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dianggap penting bagi daerah yang kaya akan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam berupa hasil pertambangan dianggap sebagai upaya daerah untuk mengelola kekayaannya secara mandiri serta mendapatkan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan didaerahnya. Demi mencapai tujuan negara maka dirumuskanlah pembagian urusan pemerintahan daerah sebagai kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Karna tujuan otonomi adalah mencapaiefektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Presiden sebagai pemilik kewenangan tertinggi berkewajiban untuk merumuskan dan menetapkan pembagian urusan pemerintahan daerah dalam suatu Undang – Undang berisi pembagian tugas pokok dan fungsi serta batasan kewenangan yang dirumuskan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan lempar tanggung jawab antar susunan / tingkatan pemerintahan daerah. Dalam sejarahnya peraturan perundang – undangan tentang pemerintahan daerah telah mengalami perjalanan cukup panjang dengan beberapa perubahan. Berikut 2 Undang – Undang terakhir yaitu Undang – Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang – Undang No 23 Tahun 2014.

Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan presiden, dimana urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan presiden. Hubungan presiden dengan gubernur dan bupati/walikota bersifat hierarkis dan hubungan gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dengan bupati/walikota juga bersifat hierarkis. Sehingga dimungkinkan terjadinya tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah seperti dalam Undang – undang No 23 tahun 2014 yang notabene adalah peraturan terbaru tentang pemerintahan daerah. Dalam UU ini terdapat penarikan beberapa urusan oleh pemerintah pusat yang sebelumnya diserahkan kepada pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam **pasal 14 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah** berbunyi “Penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi”. Berdasarkan kutipan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak lagi diberi wewenang yang berkaitan dengan kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, melainkan itu semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Ini dapat dilihat dari matriks pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Padahal dapat dilihat pada peraturan sebelumnya yaitu **Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang**

Pemerintahan Daerah telah mendesentralisasikan urusan Pertambangan, energi dan sumber daya mineral ke daerah.

Didalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah dijelaskan bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam serta kewenangan pemberian izin.

Sejak keberadaaan **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara** (selanjutnya disebut UU Minerba) maka kegiatan pertambangan mineral batu bara yang dilakukan oleh setiap orang atau perusahaan harus didasarkan pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Pasal 1 angka 6 sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dapat dilihat didalam **Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba** sebagaimana menurut Pasal 37 huruf (a) dan (b) bahwa walikota untuk memberikan IUP diwilayah Kabupaten/ Kota dan kewenangan tersebut belum beralih kepada gubernur dan kewenangan gubernur tetap sebagaimana mestinya. Akan tetapi dengan masih ada perbedaan pengaturan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan mineral-batubara antara Undang-undang Pemerintah Daerah dengan Undang-undang Minerba tentu saja hal seperti ini sangat mempengaruhi pelaksanaan pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sebab didalam UU pemda sendiri.

Pengalihan kewenangan menimbulkan dampak yang signifikan pada tupoksi dan kondisi dinas Energi dan sumber daya mineral di Pemerintahan Daerah Kabupaten maupun Provinsi. Berikut Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebelum

terbitnya UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan pasal 7 UU Minerba. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebelum terbitnya UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan pasal 7 UU Minerba.

Penulis tertarik dengan pelaksanaan pengalihan Kewenangan pertambangan energi dan sumber daya mineral terkhusus pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP pertambangan Galian C yang berada diwilayah Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten yang memiliki pertambangan Galian C berizin paling banyak di Provinsi Riau. Berkaitan dengan fenomena yang telah dipaparkan di atas penulis beranggapan bahwa Dinas energi dan Sumber daya mineral Provinsi Riau sebagai pelaksana kewenangan belum mampu dan tidak siap untuk memegang pelaksanaan kewenangan urusan energi dan sumber daya mineral. Maka, penelitian ini berusaha mengkaji tentang **“Pengalihan Penyelenggaraan Urusan Pertambangan Batuan (Galian C) Dari Pemerintah Kabupaten Kampar Ke Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017-2018”** untuk dapat menelaah lebih lanjut fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Usaha Pertambangan Galian C di Kabupaten Kampar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kampar Provinsi Riau, karena kabupaten Kampar merupakan daerah yang memiliki angka potensi pertambangan galian (C) terbanyak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*

atau teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan 4 informan yaitu kepala bidang minerba dinas ESDM provinsi Riau, kepala tata usaha cabang dinas ESDM wilayah 1 kabupaten kampar, pemilik tambang di Koto Kampar Hulu dan pemilik tambang di Bangkinang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Propinsi Riau, Indonesia. Disamping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Propinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Propinsi Riau

PEMBAHASAN

Pengalihan Penyelenggaraan Urusan Pertambangan Batuan Galian (C) Dari Pemerintah Kabupaten Kampar Ke Pemerintah Provinsi Riau

Pada bab ini penulis akan menjabarkan hasil dari penelitian penulis tentang pengalihan kewenangan urusan pertambangan dari Kabupaten Kampar ke Provinsi Riau. Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan teknik wawancara dan dokumentasi dan dianalisis dengan Teknik model interaktif yang dikemukakan Miles dan Huberman.

Semenjak disahkannya Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka setiap dinas pertambangan yang ada di kabupaten hanya memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pertambangan baru terbarukan. Namun, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau di

nonaktifkan karna tidak ada potensi pertambangan baru terbarukan di daerahnya masing-masing. Sehingga seluruh tugas, pokok dan fungsi Dinas ESDM pada tiap kabupaten/kota mengalihkan seluruh kewenangannya ke Pemerintah Provinsi Riau. Pengalihan diawali dengan penyerahan P3D dari Kabupaten/Kota ke Provinsi yaitu Personil, Pendanaan, Prasana & Sarana Dan Dokumen. Berikut penjelasan hasil dan pembahsana penelitian terkait proses penyerahan kewenangan dan pasca pengalihan kewenangan.

Proses Penyerahan Kewenangan Dari Kabupaten Kampar Ke Provinsi Riau

Sejak keberadaan **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara** (selanjutnya disebut UU Minerba) maka kegiatan pertambangan mineral batu bara yang dilakukan oleh setiap orang atau perusahaan harus didasarkan pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Pasal 1 angka 6 sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Selanjutnya setelah diundangkannya **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** (selanjutnya disebut UU Pemda), terdapat pengalihan kewenangan beberapa urusan pemerintahan sebagaimana menurut Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi : “Penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi”. Berkaitan dengan penerbitan perijinan maka dengan berlakunya UU Pemerintah Daerah telah mereduksi kewenangan pemerintah kabupaten/kota

terutama dalam bidang penerbitan IUP diwilayah administratifnya. Selanjutnya perubahan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal pengelolaan sumber daya alam terutama bidang pertambangan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah menimbulkan konsekuensi terutama terhadap pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Maka dapat difahami bahwasanya kewenangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota untuk memberikan IUP diwilayah Kabupaten/ Kota dan kewenangan tersebut belum beralih kepada gubernur dan kewenangan gubernur tetap sebagaimana mestinya. Akan tetapi dengan masih ada perbedaan pengaturan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan mineral-batubara antara Undang-undang Pemerintah Daerah dengan Undang-undang Minerba tentu saja hal seperti ini sangat mempengaruhi pelaksanaan pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sebab didalam UU pemda sendiri.

Dapat dipahami bahwa pengawasan yang dilakukan dengan evaluasi laporan dan inspeksi ke lokasi pertambangan. Jika dikaitkan dengan Provinsi Riau sebagai salah-satu unit pemerintahan daerah Provinsi di Indonesia, tentu juga merasakan dampak dari peralihan kewenangan di bidang energi dan sumber daya mineral terutama pertambangan galian C dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi. Apalagi Provinsi Riau ini memiliki komoditi pertambangan yang salah satu

terbesarnya yaitu pertambangan galian C, yaitu pertambangan Sirtu (Pasir dan batu) didarat maupun diair salah satu dari sekian banyak komoditi yang ada tersebar di berbagai kabupaten di Provinsi Riau. Terlepas dari pengalihan kewenangan urusan energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah di Riau sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha pertambangan membentuk dinas khusus yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral baik di Provinsi maupun di Kabupaten/kota.

Dengan dibentuknya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau di harapkan mampu mengurus komoditas tambang Galian C di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu, yang memiliki perusahaan bidang pertambangan menjadikan Riau bisa menjadi sentra komoditi pertambangan.

Kabupaten Kampar memiliki jumlah pertambangan yang paling banyak diantara Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau. Maka penting diinisiasi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Kampar untuk mengurus urusan pertambangan galian C di Kabupaten Kampar sendiri. Namun pengalihan kewenangan berdampak cukup besar terhadap dinas ESDM Provinsi Riau maupun Kabupaten Kampar sehingga banyak perubahan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut. BerikutnTupoksi Dinas ESDM Provinsi Riau pasca peralihan kewenangan urusan pertambangan berdasarkan Pergub No 48 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dias Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Terdapat perbedaan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Riau yaitu Penyederhanaan dan efektivitas kewenangan membuat tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan sumber daya mineral terlihat sedikit. namun sebenarnya setelah peralihan kewenangan menjadi dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang lebih banyak karena tupoksi dari dinas ESDM Kabupaten Kampar dialihkan kepada Dinas ESDM Provinsi Riau. Berikut perbandingan tugas pokok dinas ESDM Kabupaten Kampar pra dan pasca Peralihan kewenangan.

peralihan kewenangan menyebabkan dampak yang begitu besar terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Kabupaten Kampar. Untuk menghindari kevakuman pelaksanaan pemerintahan dalam pelayanan publik dan urusan lainnya dan untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat luas, maka dilaksanakanlah transfer dan serah terima P3D sesuai dengan pasal 404 UU No 23 Tahun 2014 yang berbunyi “serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang – undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan”

Serah terima P3D dianggap penting sehingga **Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Surat Edaran No : 120/5935/SJ Tentang Percepatan**

Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tanggal 16 juni 2015. Dalam Surat Edaran ini dijelaskan bahwa inventarisasi P3D paling lambat 31 maret 2016, serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen paling lambat 2 oktober 2016, serah terima pendanaan paling lambat 31 Desember 2016.

Sesuai surat edaran kementerian dalam negeri maka Pemerintah Kabupaten/kota bertanggung jawab untuk segera melaksanakan langkah – langkah kongkrit dalam pelaksanaan inventarisasi P3D salah satunya dengan membentuk tim pelaksana serah terima P3D yang beranggotakan dari OPD atau unit kerja yang menangani bidang pemerintahan (koodinator), keuangan, kepegawaian aset/perlengkapan, Arsip, Inspektorat, organisasi, hukum, perencanaan daerah dan instansi terkait lainnya.

Kelompok – kelompok kerja diatas diharapkan mampu melaksanakan percepatan pengalihan kewenangan urusan pemerintahan yang terjadi akibat berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan dana 47 miliar untuk pelaksanaan penyerahan P3D sektor pertambangan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan (musrenbang) Provinsi Riau tahun 2017.

Personel merupakan komponen penting dalam pemerintahan demi terlaksananya kewenangan secara

efektif. Sehingga transfer/penyerahan personel yang dianggap penting agar personel pemerintahan daerah kabupaten yang berkompeten dapat mensukseskan pelaksanaan kewenangan yang telah dialihkan. Sesuai **Perka BKN No 10 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan pengalihan PNS yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang ESDM** diundangkan pada tanggal 29 April 2016. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menjelaskan tentang Kriteria ASN yang dapat dialih tugaskan ke Kementerian ESDM dan Ke Pemerintah Provinsi. Kriteria ASN yang dapat dialih tugaskan ke Kementerian ESDM tercantum pada pasal 9 dan kriteria ASN yang dapat dialih tugaskan ke Pemerintah Daerah Provinsi selaras dengan pasal 10. Namun selaras dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri bahwa dalam pelaksanaan pengalih tugas personil tidak diperkenankan melalukan mutasi/perpindahan personil yang beralih urusannya diinternal provinsi dan kabupaten/kota dan pengalihan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah. Hal ini juga berkaitan dengan pengalihan sarana dan prasarana yang harus diserahkan paling lambat tanggal 2 oktober 2016 diseluruh Indonesia.

Terkait serah terima pendanaan sesuai dengan surat edaran kementerian dalam negeri yaitu mencakup gaji dan tunjangan, biaya operasional kantor dan biaya perawatan agar disiapkan alokasi

anggaran untuk urusan pemerintahan yang terjadi peralihan paling lambat 31 desember 2016.

Selaras dengan Pasal 402 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi “Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin” maka pengalihan dokumen perizinan yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota mutlak dilakukan. Dokumen yang diserahkan kepada gubernur tersebut berupa IUP eksplorasi, IUP Operasi Produksi, mineral logam, IUP Mineral Bukan Logam, Batuan dan batubara.

Pemerintah provinsi Riau telah menerima inventarisai P3D dari seluruh urusan yang dialihkan oleh Pemerintah Se-kabupaten/kota di Riau. Begitu pula dengan dokumen perizinan usaha pertambangan galian C yang diserahkan oleh daerah yang memiliki potensi galian C tersebut. Berikut Data rekapitulasi penyerahan dokumen pemegang izin IUP yang diterima oleh dinas ESDM Provinsi Riau.

Dinas ESDM Kabupaten Kampar telah melaksanakan penyerahan P3D pada tanggal 28 Oktober 2016. Tenaga teknis yang dipindahkan ke Provinsi sebanyak 20 orang, dan 6 lainnya kepusat. Sedangkan 22 orang tenaga honorer diserahkan kepada BKD Kabupaten Kampar untuk pengambilan kebijakan yang lebih lanjut. Hal diatas disampaikan oleh Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kampar.

Pasca pengalihan kewenangan urusan pertambangan energi dan sumber

daya mineral maka ditetapkanlah pemindahan dinas tersebut ke Provinsi Riau. Sehingga dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kampar sudah dibekukan/likuidasi karena kewenangannya sudah diserahkan kepada provinsi Riau. Penetapan ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2017. Mengingat Pemerintah kabupaten hanya memiliki kewenangan mengurus sub urusan energi baru terbarukan dan menimbang di Kabupaten Kampar belum ditemukan pertambangan energi baru terbarukan maka pemerintah kabupaten meniadakan Dinas Energi dan sumber daya mineral sebagaimana dalam **Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar** Tidak ditemukan Dinas ESDM sebagai salah satu OPD kabupaten Kampar.

Usaha pertambangan Galian C merupakan usaha eksplorasi pasir dan batu. Jika kegiatan pertambangan tersebut dilaksanakan asal - asalan dan tanpa pembinaan serta pengawasan yang baik maka dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan seperti kerusakan alam dan krisis air. Sehingga aktifitas usaha pertambangan tersebut sesuai dengan UU No 04 tahun 2009 tentang mineral dan batubara bahwa aktifitas pertambangan harus memiliki izin terlebih dahulu karena mengingat kajian kerusakan lingkungan yang sangat berbahaya. Pasca pengalihan kewenangan maka Pemerintah Provinsilah yang dapat memberikan

pembinaan dan pengawasan pada pemegang IUP kegiatan pertambangan.

Sesuai **Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau** bahwa Lembaga dinas khusus yang diberi kewenangan untuk mengurus urusan pertambangan energi dan sumber daya mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Dalam melaksanakan tugasnya maka ditetapkanlah **Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau** sebagai pedoman dan dasar hukum dinas ESDM dalam melakukan fungsinya.

Dalam meninjau tujuan beserta fungsi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau ini tertuju kepada usaha pertambangan batuan galian C yang telah ada di daerah kawasan provinsi Riau, jika dilihat tugas dari dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ini hanya mengurus perusahaan pertambangan galian C yang sudah berizin, yang merujuk kepada **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** termasuk juga didalamnya sektor usaha pertambangan galian C. Namun walaupun fokus tugas Dinas ESDM Provinsi Riau dalam membina dan juga mengawasi usaha pertambangan batuan galian C yang berada di wilayah Kabupaten Kampar yang sudah berstatus sudah mendapat izin usaha, bukan

berarti dapat berjalan dengan lancar, karena pasalnya walaupun sudah mendapatkan izin, bukan berarti jalannya pertambangan tersebut berjalan sesuai dengan aturan serta ketentuan yang sudah dibuat dan tertera didalam syarat dan kewajiban dari perizinan tersebut, karena masih ada terdapat kesalahan dan tidak tertib aturan yang dilakukan oleh para pemilik pertambangan khususnya di Kabupaten Kampar.

Adanya perubahan jumlah pemegang IUP dari tahun 2017 hingga tahun 2018, dikarenakan berakhirnya masa berlaku IUP pemegang usaha pertambangan batuan Galian C yang ada di Provinsi Riau. Masa berlaku IUP berakhir paling banyak terdapat pada Kabupaten Kampar yaitu 14 titik pertambangan yang tidak berkelanjutan izin, dan paling banyak jumlah pemegang IUP pertambangan.

Berdasarkan data laporan dari bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Riau, diketahui bahwa ada 14 pertambangan yang berakhir masa berlaku IUP, namun sampai saat ini belum ada kepastian perpanjangan masa IUP oleh usaha pertambangan yang bersangkutan. Padahal pada beberapa kesempatan terlihat pertambangan tersebut tetap melaksanakan kegiatan produksi tanpa menghiraukan masa berlaku IUP yang telah berakhir. Sampai saat ini per 31 Desember 2018 ada 14 usaha pertambangan pemegang IUP mineral batu bara yang masih aktif di Kabupaten Kampar.

Kewajiban para pemilik tambang ini dapat dilihat **pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral**

Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal Pasal 26 (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib. Namun dalam implementasinya banyak usaha pertambangan galian c tidak melaksanakan kewajibannya. Rencana Kerja Anggaran Belanja tahunan (RKAB) merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha pertambangan galian C. karena melalui RKAB tersebut dapat melihat secara detil pelaksanaan eksplorasi pertambangan tersebut, sehingga RKAB menjadi salah satu indikator pembinaan dan pengawasan Pemerintah Provinsi terhadap kegiatan usaha pertambangan Galian C. Dapat dilihat adapun daftar pemilik IUP yang tidak melaksanakan kewajiban.

Sebanyak 14 pemegang IUP aktif terdapat 9 pemegang IUP yang tidak melaporkan RKAB. Sekitar 64 % dari pemegang IUP di kabupaten Kampar tidak melaksanakan kewajibannya dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan tersebut. RKAB 81 dinilai penting karena pemantauan pertambangan akan lebih mudah dilakukan sehingga kegiatan usaha pertambangan tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan dampak positif terhadap lingkungan.

Selain pelaporan RKAB, Dinas energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Riau melaksanakan pengawasan terhadap pelaku pertambangan dengan turun langsung ke lokasi pelaksanaan aktifitas usaha pertambangan yang berada di wilayah kabupaten Kampar. Namun banyaknya usaha pertambangan

Galian C yang diawasi serta jarak yang cukup jauh dengan pusat kota membuat pengawasan tidak berjalan secara efektif.

Sesuai SK Kemendagri Nomor 120/5935/SJ Tahun 2015 Tentang percepatan pelaksanaan pengalihan urusan pemerintahan. maka Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk segera melaksanakan langkah – langkah kongkrit dalam pelaksanaan inventarisasi P3D salah satunya dengan membentuk tim pelaksana serah terima P3D yang beranggotakan dari OPD atau unit kerja yang menangani bidang pemerintahan (koodinator), keuangan, kepegawaian, aset/perengkapan, Arsip, Inspektorat, organisasi, hukum, perencanaan daerah dan instansi terkait lainnya.

Peralihan urusan pertambangan sudah dimulai sejak tahun 2004 s/d 2016 karena masa transisi 82 hanya 2 tahun terhitung semenjak diterbitkannya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah. Pelaksanaan pengalihan urusan pertambangan ini menggunakan dana yang cukup besar. Sebagaimana wawancara dengan Kepala bidang Minerba Dinas ESDM Prov Riau. Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan dana 47 miliar untuk pelaksanaan penyerahan P3D sektor pertambangan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan (musrenbang) Provinsi Riau tahun 2017. Komponen P3D yang di tranfer meliputi Personil, Pendanaan, Prasarana sarana dan Dokumentasi.

Dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai ESDM di Kabupaten Kota yang

akan dialihkan ke pemerintah Provinsi (pemprov) Riau ada 105 orang. Yang mana, 64 orang diantaranya memiliki kompetensi teknis sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu diantaranya, berijazah elektro. Biologi, pertambangan dan sisanya humaniora. Personel merupakan komponen penting dalam pemerintahan demi terlaksananya kewenangan secara efektif. Sehingga transfer/penyerahan personel yang dianggap penting agar personel pemerintahan daerah kabupaten yang berkompeten dapat mensukseskan pelaksanaan kewenangan yang telah dialihkan. Sesuai **Perka BKN No 10 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan pengalihan PNS yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang ESDM** diundangkan pada tanggal 29 April 2016 **ESDM** diundangkan pada tanggal 29 April 2016.

Namun selaras dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri bahwa dalam pelaksanaan pengalih tugas personil tidak diperkenankan melalukan mutasi/perpindahan personil yang beralih urusannya diinternal provinsi dan kabupaten/kota dan pengalihan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah. Hal ini juga berkaitan dengan pengalihan sarana dan prasarana yang harus diserahkan paling lambat tanggal 2 oktober 2016 di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan kewenangan sebuah urusan pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan pendanaan yang baik. Seperti

pelaksanaan pengawasan, pembinaan terhadap pelaku usaha Galian C kemudian pelaksanaan teknis lain yang mengakibatkan pengeluaran dana seperti pembelian bahan bakar, honor serta pemenuhan sarana dan prasarana.

Terkait serah terima pendanaan sesuai dengan surat edaran kementerian dalam negeri yaitu mencakup gaji dan tunjangan, biaya operasional kantor dan biaya perawatan agar disiapkan alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan yang terjadi peralihan paling lambat 31 desember 2016.

Unsur terakhir yang harus diserahkan yaitu Dokumen. Selaras dengan UU dengan Pasal 402 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi “Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin” maka pengalihan dokumen perizinan yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota mutlak dilakukan. Dokumen yang diserahkan kepada gubernur tersebut berupa IUP eksplorasi, IUP Operasi Produksi, mineral logam, IUP Mineral Bukan Logam, Batuan dan batubara. Sehingga seluruh dokumen perijinan harus diserahkan kepada Dinas ESDM Provinsi Riau.

Pemerintah provinsi Riau telah menerima inventarisasi P3D dari seluruh urusan yang dialihkan oleh Pemerintah Se-kabupaten/kota di Riau. Begitu pula dengan dokumen perizinan usaha pertambangan galian C yang diserahkan oleh daerah yang memiliki potensi galian C tersebut. Berikut Data rekapitulasi

penyerahan dokumen pemegang izin IUP yang diterima oleh dinas ESDM Provinsi Riau.

Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kampar terdapat 28 Galian C pemegang IUP yang dokumennya diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Dinas ESDM Kabupaten Kampar telah melaksanakan penyerahan P3D pada tanggal 28 Oktober 2016. Tenaga teknis yang dipindahkan ke Provinsi sebanyak 20 orang, dan 6 lainnya kepusat. Sedangkan 22 orang tenaga honorer diserahkan kepada BKD Kabupaten Kampar untuk pengambilan kebijakan yang lebih lanjut. Hal diatas disampaikan oleh Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kampar.

Pasca Pengalihan Kewenangan Dari Kabupaten Kampar Ke Provinsi Riau

Pasca pengalihan kewenangan urusan pertambangan energi dan sumber daya mineral maka ditetapkanlah pemindahan dinas tersebut ke Provinsi Riau. Sehingga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kampar sudah dibekukan/likuidasi karena kewenangannya sudah diserahkan kepada provinsi Riau. Penetapan ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2017. Mengingat Pemerintah kabupaten hanya memiliki kewenangan mengurus sub urusan energi baru terbarukan dan menimbang di Kabupaten Kampar belum ditemukan pertambangan energi baru terbarukan maka pemerintah kabupaten meniadakan Dinas Energi dan sumber daya mineral sebagaimana dalam **Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan**

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tidak ditemukan Dinas ESDM sebagai salah satu OPD kabupaten Kampar.

Untuk memudahkan fungsi Dinas ESDM Provinsi Riau maka dibentuklah 7 cabang Dinas ESDM dengan wilayah kerja masing-masing. Sebagaimana wawancara dengan bapak Ridwan selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Riau.

“Gubernur langsung menginstruksikan membuat cabang dinas, ada 7. Itu semua melaksanakan urusan pertambangan yang bersifat teknis”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memang telah dibentuk cabang dinas untuk melaksanakan fungsi dinas yang ada di kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur no 86 tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017 tentang Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, maka dibentuklah 7 cabang dinas.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Ridwan selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Riau.

“Tupoksinya sudah ada di PerGub.. nah ini kan memang sudah instruksi Gubernur jadi ya mau tidak mau harus dilaksanakan.walaupun banyak provinsi lain yang tidak membuat cabang dinas karena memang tidak efektif”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pembentukan Cabang Dinas ESDM adalah inisiasi Gubernur yang mau tidak mau harus dijalankan oleh Dinas ESDM Provinsi Riau walaupun pihak dinas merasa

pembentukan cabang dinas tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa sejak awal pembentukan Cabang Dinas tidak berkordinasi terlebih dahulu dengan pihak Dinas ESDM Provinsi Riau.

Pembentukan Cabang Dinas adalah solusi dari pelaksanaan urusan pertambangan yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi agar pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha pertambangan pemegang IUP dalam berjaan dengan baik. Namun ternyata dilapangan tidak terjadi sesuai dengan harapan sebagaimana wawancara dengan bapak Ridwan selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Riau.

“Tupoksinya sudah ada di PerGub, nah ini kan memang sudah instruksi Gubernur jadi ya mau tidak mau harus dilaksanakan.walaupun banyak provinsi lain yang tidak membuat cabang dinas karena memang tidak efektif”

Hasil wawancara diatas yaitu tupoksi telah dijelaskan dalam Peraturan Gubernur, kemudian sebagai pelaksana regulasi maka dinas mau tidak mau membentuk cabang dinas walaupun pihak dinas sebagai pelaksana pengawasan dan pembinaan urusan pertambangan merasa pembentukan cabang dinas bukan merupakan solusi terbaik karena tidak bisa memangkas birokrasi dalam arti lain birokrasi tidak menjadi efektif malah memperpanjang birokrasi.

Kemudian dijelaskan pula bahwa Pihak dinas memiliki persepsi yang salah jika mengira pembentukan cabang dinas akan menghilangkan kewenangan Dinas

ESDM yang berada di Pemerintah Provinsi.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Khoiril Fahmi selaku Kepala tata usaha Cabang Dinas ESDM wilayah I Kabupaten Kampar.

“kita sudah berdiri 2 tahun. Kita menyewa tempat dan sudah pindah dari tempat kemarin. Karena sewanya sudah habis. Tapi selama 2 tahun ini hanya 1 kali rapat antara dinas dan cabang dinas. Jadi sampai saat ini memang kita merasa tidak dibina dengan baik ”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa selama 2 tahun terbentuk Dinas ESDM baru 1 kali mengadakan rapat yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Cabang Dinas Kabupaten Kampar. Kemudian keterbatasan tempat membuat cabang dinas menyewa tempat sebagai kantor dan sudah berpindah di dua tempat dalam 2 tahun ini. Sedangkan dalam pengamatan penulis, Gedung Dinas ESDM Kabupaten Kampar yang lama malah terlantar tidak berpenghuni. Ketika di konfirmasi kepada cabang dinas dikatakan bahwa Gedung tersebut adalah asset pemerintahan Kabupaten Kampar bukan asset Pemerintah Provinsi Riau sehingga tidak dapat digunakan sebagai kantor cabang dinas ESDM Wilayah I Kabupaten Kampar. Padahal seharusnya sarana dan prasarana yang dimiliki dinas ESDM Kabupaten Kampar seluruhnya telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau agar pengurusan urusan pertambangan di Kabupaten Kampar dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan yang terjadi yaitu tidak adanya petunjuk teknis yang berisi

rincian tugas serta kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah I Kabupaten Kampar. Sehingga jika ada permasalahan, Cabang Dinas tidak bisa langsung memutuskan kebijakan namun harus melaporkan dan konsultasi dengan Dinas ESDM yang berada di Pekanbaru. Dengan kata lain bahwa Pembentukan Cabang dinas seharusnya meringkas birokrasi namun kenyataannya malah memperpanjang birokrasi terkait pengambilan keputusan atau kebijakan terhadap suatu masalah/urusan.

Dalam melaksanakan pengurusan terhadap urusan pertambangan di Kabupaten Kampar tentu membutuhkan pendaanaan yang cukup agar dapat terurus dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan bapak Khoiril Fahmi selaku Kepala tata usaha Cabang Dinas ESDM wilayah I Kabupaten Kampar tentang Pendanaan terkait pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertambangan Galian C.

Berdasarkan data diatas dikatakan bahwa dana yang diberikan hanya dana untuk operasional saja yaitu digunakan untuk beli ATK kantor, gaji pegawai sewa Gedung, listrik dll. Namun untuk pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertambangan Galian C selama ini tidak pernah diterima oleh pihak Cabang Dinas ESDM Wilayah I Kabupaten Kampar walaupun dalam pendanaan dinas ESDM telah dianggarkan dana khusus pembinaan dan pengawasan tapi secara umum kemudian dana tersebut tidak diturunkan kepada Cabang dinas ESDM Wilayah I Kabupaten Kampar namun digunakan langsung oleh Dinas

ESDM Provinsi Riau. Dalam beberapa kesempatan Dinas ESDM Provinsi Riau mengadakan kegiatan di wilayah Cabang Dinas ESDM wilayah I Kabupaten Kampar yaitu di Kecamatan Tapung namun tidak pernah berkordinasi dengan Cabang Dinas Wilayah I Kabupaten Kampar.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dikarekan tidak adanya dana maka Cabang Dinas ESDM Kabupaten Kampar tidak dapat melaksanakan banyak hal. Namun selalu turun jika ada laporan masyarakat itupun jika jaraknya memungkinkan untuk ditempuh tanpa dana. Kemudian setelah sampai dilokasi pihak Cabang Dinas hanya menghimbau pelaku usaha untuk mengurus perijinan dan menghimbau agar memperbaiki pola pengelolaan usaha batuan Galian C milik mereka. Dalam hal ini Cabang dinas dalam 2 tahun ini sudah 5 kali turun kelokasi di daerah sekitar Bangkinang.

Kemudian penulis melakukan wawancara terhadap pelaku usaha batuan Galian C yang tidak melakukan penyerahan RPKAB sebagai dokumen laporan yang menjadi indikator pengawasan pemerintah. Sebagaimana wawancara dengan bapak Zulfahmi selaku pemilik usaha batuan galian C yang tidak menyerahkan dokumen RKAB

“RKAB itu banyak hitungannya, jadi hanya insinyur atau orang Teknik saja yang bisa bikin laporan itu. Nah, ini kan (usaha Galian C) punya pribadi, saya tidak punya pegawai insinyur jadi susah kalau bikin laporan itu. Semua kerja disini pekerja kasar saja.”

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan pelaku usaha yang kepemilikannya atas pribadi tidak merekrut pekerja/pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai untuk menyusun RPKAB. Ditemukan bahwa banyak pelaku usaha yang enggan menggaji pegawai dengan kualifikasi sarjana Teknik geologi karena gaji yang dibayarkan akan sangat tinggi. Kemudian penulis juga mewawancarai pelaku usaha pertambangan galian C yang berbadan usaha dengan bentuk PT. Sebagaimana wawancara dengan bapak Ardin selaku Humas PT Pantian Ragi Perkasa yang tidak menyerahkan dokumen RKAB.

Berdasarkan pemaparan penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertambangan di Kabupaten Kampar lebih efektif saat sebelum pengalihan kewenangan urusan pertambangan. Kemudian perbedaan persepsi terhadap pembentukan Cabang Dinas membuat Cabang Dinas tidak terlalu diperhatikan oleh Dinas ESDM Provinsi Riau dibuktikan dengan tidak adanya petunjuk teknis yang diterbitkan terkait tugas harian dan kewenangan yang jelas yang bisa dilakukan oleh Cabang Dinas. Cabang Dinas tidak dimanfaatkan dengan baik untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibuktikan dengan tidak dianggarkannya pendanaan khusus pembinaan dan pengawasan sehingga Cabang Dinas terlihat seperti tidak ada kerja. Pembinaan dan pengawasan berjalan tidak optimal selama 2017-2018

pasca pengalihan kewenangan urusan pertambangan terkait usaha batuan galian C.

Faktor – faktor yang menghambat implementasi pengalihan kewenangan urusan pertambangan batuan galian (C)

Semenjak diterbitkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka kewenangan urusan pertambangan dialihkan ke pemerintah Provinsi tak terkecuali kewenangan urusan pertambangan di Kabupaten Kampar yang dialihkan ke pemerintah Provinsi Riau. Kemudian untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur No 86 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Cabang Dinas ESDM Provinsi Riau. Namun, selama 2 tahun terbentuk Cabang dinas belum melaksanakan urusan pertambangan di Kabupaten Kampar dengan optimal. Berikut penulis paparkan faktor-faktor yang menghambat implementasi pengalihan kewenangan urusan pertambangan dari Kabupaten Kampar ke Dinas ESDM Provinsi Riau dan menjadi alasan kenapa pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertambangan batuan Galian C di Kabupaten Kampar tidak terlaksana secara optimal.

Kurangnya kordinasi antara pemerintah Provinsi Riau (Gubernur) dengan Dinas ESDM Provinsi Riau

Regulasi terkait pengalihan kewenangan urusan pertambangan sudah diterbitkan maka Gubernur memiliki inisiatif untuk membentuk Cabang Dinas sebagai perpanjangan tangan Dinas

ESDM Provinsi Riau untuk menjangkau seluruh daerah di Riau. Namun ternyata pihak Dinas ESDM merasa bahwa Cabang Dinas tidak diperlukan karena pembentukan cabang dinas dianggap tetap tidak dapat memangkas birokrasi menjadi efektif dan efisien. Sehingga 2 tahun semenjak dibentuknya cabang dinas wilayah I Kabupaten Kampar terkesan tidak diperhatikan dan potensinya tidak dimaksimalkan dengan baik oleh Dinas ESDM Provinsi Riau. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya rapat kordinasi terkait kewenangan Cabang Dinas dan tidak adanya petunjuk teknis yang diturunkan oleh Dinas ESDM Provinsi Riau terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Cabang Dinas sehingga setiap terjadi laporan masyarakat cabang dinas tidak bisa membuat kebijakan namun harus melaporkan dan berkonsultasi kepada pihak Dinas ESDM Provinsi Riau terlebih dahulu. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kordinasi yang terjalin tidak begitu baik.

Kurangnya kompetensi personil/pegawai yang diposisikan pada kantor Cabang Dinas ESDM Provinsi Riau

Pasca terbentuknya cabang dinas maka Dinas ESDM Provinsi Riau diharuskan untuk mengisi posisi pegawai yang akan bekerja di tiap cabang dinas. Sebagaimana wawancara dengan bapak Ridwan selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Riau. Pegawai cabang dinas awalnya merupakan pegawai Dinas Pertambangan Kabupaten/Kota kemudian setelah ditranfer ke Provinsi dikembalikan lagi

menjadi pegawai Cabang Dinas. Namun jumlah personil yang tidak sesuai seperti meranti yang hanya 1 orang menyakibatkan cabang dinas tidak dapat bergerak seperti yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan Provinsi. Kemudian kompetensi, kemampuan pegawai dalam pelaksanaan kewenangan juga dianggap tidak relevan dengan tupoksi yang diamanahkan.

Jumlah personil Dinas ESDM Provinsi Riau tidak mampu melaksanakan seluruh tupoksi yang diberikan oleh Undang-Undang

Pasca pembentukan cabang dinas terlihat jumlah pegawai Dinas ESDM Provinsi Riau semakin sedikit. Sedangkan amanah yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM begitu banyak. Sebagaimana wawancara dengan bapak Ridwan selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Riau.

“kita kehilangan 7 pegawai teknis untuk diposisikan ke cabang dinas. Pegawai teknis ini penting untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pertambangan. Dinas ESDM merupakan dinas yang melaksana amanah undang-undang terbanyak ada 5 undang-undang yang harus kami jalankan. Sehingga jumlah pegawai berbanding jauh dengan banyaknya tupoksi yang telah ditetapkan”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas ESDM Provinsi Riau malah harus kehilangan 7 pegawai dengan kompetensi teknis yang baik untuk mengisi posisi di cabang dinas ESDM di 7 wilayah. Hal ini membuat Dinas ESDM Provinsi Riau kerepotan

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang begitu banyak dengan jumlah pegawai dengan kompetensi yang sesuai.

Urusan pertambangan dialihkan ke pemerintah provinsi namun pajak/retribusi pertambangan mengalir ke pemerintah daerah kabupaten Kampar

Urusan pemerintahan bidang pertambangan memang telah dialihkan kepihak Provinsi namun pembinaan dan pengawasan pelaku usaha batuan galian C dan usaha pertambangan yang lain tidak berjalan dengan baik salah satunya karena perihal pajak/retribusi yang tetap mengalir ke pemerintah Kabupaten/Kota. wawancara dengan bapak Khoiril Fahmi selaku Kepala tata usaha Cabang Dinas ESDM wilayah I Kabupaten Kampar.

“pemerintah Provinsi Riau tidak begitu bergairah mengurus usaha pertambangan galian C dan pertambangan lain yang sejenis. Karena memang provinsi tidak mendapat apa-apa. Hanya dapat kerja saja. Seharusnya kan yang mengawasi provinsi ya retribusinya ke provinsi agar dapat yang didapat bisa dianggarkan untu pembinaan dan pengawasan. Sekarang yang diawasi banyak tapi dana untuk pengawasan tidak ada. Bagaimana kita bisa bergerak.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Riau berikut dengan cabang dinasnya karen kurangnya dana dan pandangan pegawai bahwa pembinaan dan

pengawasan yang dilakukan percuma karena tidak dapat menghasilkan pajak/retribusi untuk pendapatan pemerintah Provinsi Riau. Sehingga pembinaan dan pengawasan pelaku usaha batuan galin C di Kabupaten Kampar tidak terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pengalihan kewenanga pemerintah urusan pertambangan berjalan cukup baik. Namun, khususnya di Kabupaten Kampar mengakibatkan Gedung kantor Dinas pertambangan Kabupaten Kampar terlihat terbengkalai tidak dipakai. Sedangkan Cabang Dinas Wilayah I Kabupaten Kampar harus menyewa bangunan untuk dijadikan kantor. Dalam tranfer P3D salah satunya adalah Sarana dan Prasarana harus dialihkan juga menjadi asset pemerintah Provinsi Riau demi terlaksana pengurusan bidang pertambangan yang baik.
2. Pasca pengalihan urusan pemerintah bidang pertambang ke Pemerintah Provinsi Riau maka Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan banyak upaya untuk dapat melaksanakan kewenangan dengan baik berdasarkan Undang-Undag yang berlaku. Salah satunya membentuk Cabang Dinas yang dibagi menjadi 7 Wilayah. Namun, dilapangan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau baik Dinas

ESDM Provinsi Riau maupun Cabang Dinas Wilayah I Kabupaten Kampar belum optimal.

Dikarenakan berbagai faktor antara lain :

- a. Kurangnya kordinasi antara pemerintah Provinsi Riau (Gubernur) dengan Dinas ESDM Provinsi Riau. Begitupun dengan kordinasi yang dilakukan Dinas ESDM Provinsi Riau dengan Cabang Dinas Wilayah I Kabupaten Kampar sangat terjaling dengan tidak baik.
- b. Kompetensi personil/pegawai yang diposisikan pada kantor Cabang Dinas ESDM Provinsi Riau diberbagai wilayah dianggap tidak memadai untuk menjalankan tugas pokok fungsinya yang begitu kompleks.
- c. Jumlah personil/pegawai Dinas ESDM Provinsi Riau sedikit sedangkan tupoksi yang harus di jalankan begitu banyak.
- d. Pengalihan urusan pertambangan ke Pemerintah Provinsi tidak dibarengi dengan pengalihan pajak/retribusi usaha pertambangan. Sehingga pemerintah Provinsi Riau yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan namun Pemerintah Kabupaten yang menerima pajak/retribusi usaha pertambanan batuan Galian C. hal ini menjadi faktor penting penyebab kurnag optimalnya pembinaan dan

pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Saran

Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, penulis merasa bertanggung jawab untuk memberikan saran demi kemajuan dan efektifitas jalannya pemerintahan terkhusus pemerintahan urusan pertambangan diprovinsi Riau. Berikut saran yang dalam kamu sampaikan :

1. Meningkatkan kordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah sangat dibutuhkan. Seharusnya pemerintah Provinsi (Gubernur) dapat mengetahui kapasitas dan kemampuan perangkat daerahnya dan berdiskusi untuk dapat mendapatkan solusi yang lebih efektif.
2. Diterbitkannya petunjuk teknis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas yang wajib dilakukan oleh cabang dinas. Berikut dengan kewenangan yang rinci agar dapat memutuskan kebijakan secara cepat sehingga birokrasi dpat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
3. Kewenangan Dinas ESDM Provinsi Riau Sebaiknya dapat diperluas mengingat ketidak berdayaan Dinas ESDM Provinsi Riau memberantas pertambangan illegal (*illegal mining*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta : UII Press
- Adrian Sutedi, 2012. *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 1994.
- Bungin Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. :Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Feriyanto, Andri dan Triana, Endang. 2015. *Pengantar Manajemen*. Kebumen : Mediaterra.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ivancevich. 2008. *Pembinaan Perilaku dan Sikap*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Manulang. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Mathis Robert, Jacson Jhon. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat